



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT**

**KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEKDIKTI, DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 30 Maret 2015</b>
Waktu	: <b>Pukul 10.30 – 14.10 WIB</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Teuku Riefky Harsya, M.T.</b> / Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Agus Salim, SH./ Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Peran dan Kontribusi BUMN Bidang Pariwisata dalam mencapai target 20 juta wisman tahun 2019; 2. Pengelolaan Kepariwisataaan; 3. Lain-lain.
Hadir	: a. 29 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI. b. 1. PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC); 2. PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko; dan 3. PT. Hotel Indonesia Natour (HIN)

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/ Teuku Riefky Harsya, M.T., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN / KEPUTUSAN**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan PT.ITDC, PT.HIN, dan PT.TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, utamanya dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata dan perhotelan,

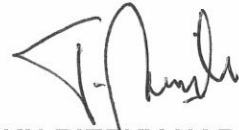
2. Komisi X DPR RI mencatat beberapa permasalahan, antara lain:
  - a. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) / PT.Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).
    1. Perlunya pengembangan pengelolaan kawasan strategis pariwisata di daerah lain termasuk pulau-pulau kecil yang memiliki potensi.
    2. Perlunya pembangunan infrastruktur dasar pariwisata.
    3. Perlu adanya penambahan *seat capacity* penerbangan dari sumber wisatawan menuju ke kawasan pariwisata.
    4. Perlunya promosi/pemasaran pariwisata Indonesia secara terpadu.
    5. Dalam rangka mendukung tercapainya target peningkatan wisman/wisnus, ITDC dapat diberikan prioritas PMN pada APBN 2016.
  - b. PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.
    1. Adanya tumpang tindih regulasi terkait cagar budaya, tata ruang, pariwisata, serta regulasi sektoral daerah sehingga dibutuhkan keselarasan dan kemauan antar pemangku kepentingan.
    2. Belum dikeluarkannya PP yang diamanatkan dalam UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
    3. Kurangnya infrastruktur pendukung, terutama bandar udara yang layak.
    4. Adanya dukungan promosi dari Pemerintah, salah satunya dengan promosi bersama yang lebih optimal, strategis, dan terintegrasi.
  - c. PT. Hotel Indonesia Natour (HIN).
    1. Perlu adanya peningkatan pengelolaan dan kerjasama hotel-hotel yang berada dalam ruang lingkupnya, sehingga 12 hotel yang dikelola PT.HIN memiliki standar produk dan layanan yang sama.
    2. Perlu adanya inisiatif strategis PT.HIN yang mencakup pembangunan kembali unit-unit hotel, pengembangan organisasi, dan mendirikan bisnis baru antara lain, operator hotel, manajemen properti, pengelolaan kawasan, dan jasa pariwisata terkait.
    3. Dalam rangka mendukung tercapainya target peningkatan wisman/wisnus, PT.HIN dapat diberikan prioritas PMN pada APBN 2016.
    4. Perlu adanya cetak biru tentang sinergi pengelolaan hotel milik Pemerintah atau BUMN yang saat ini masih banyak dikelola secara terpisah oleh masing-masing BUMN.
3. Komisi X DPR RI mengharapkan PT.ITDC, PT.HIN, dan PT.TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan dan pengembangan bidang pariwisata di Indonesia sehingga kontribusi bidang pariwisata terhadap pendapatan domestik bruto secara nasional dapat meningkat.

4. Terhadap seluruh masukan dan permasalahan yang disampaikan PT.ITDC, PT.HIN, dan PT.TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan RDPU dengan Pemerintah utamanya dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.10 WIB.

**KETUA RAPAT,**



**TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.**